

Pendampingan Masyarakat Kawasan Hutan Produksi Kotawaringin Kabupaten Bangka

Ari Agung Nugroho¹, Nanang Wahyudin¹, Wenni Anggita²

¹Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung
email corespondensi: enghietha@gmail.com

Article History

Received : 30/10/2022

Revised : 10/11/2022

Accepted : 30/11/2022

Abstract : Forest implementation as a national development asset is very beneficial for life and livelihood. Participation in the level of community involvement in the empowerment process around the Kotawaringin forest area, Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province, as well as an effective community empowerment strategy or in accordance with the socio-cultural conditions of the community around the forest area have the potential to improve community welfare and forest sustainability. Empowering local communities aims to determine the implementation of effective community empowerment models and strategies for communities living around forest areas in accordance with local conditions and potential. The community empowerment method used is the formulation of effective community empowerment models and strategies for communities around forest areas by planting hybrid coconuts that are in accordance with local conditions and potential. Various stages were carried out in empowering the community in the first forest area, in the form of raising awareness by providing understanding to the community through socialization activities regarding the management of production forest areas. The next stage of planning is by involving the community in compiling activity programs for production forest groups, community participation becomes a learning medium for the community in compiling an activity program. The results of this empowerment activity are seen from an economic perspective, namely that the community can improve the family economy by utilizing forest areas as business products and utilizing production forest areas. When viewed from an educational perspective, it is in the form of increasing the capacity of human resources, community welfare in maintaining and preserving forest areas. And when viewed from a social perspective, namely the creation of cooperation and mutual cooperation between village communities in maintaining and utilizing production forest areas. The expected output in community empowerment will be input for community empowerment around production forests in Kotawaringin, Bangka Regency.

Keywords

Forest Empowerment, preserving forest areas, production forests

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi salah satunya kawasan hutan. Keberadaan sumber daya alam kawasan hutan tersebut memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dalam pengelolaannya dengan pengawasan pemerintah. Selain itu juga memberikan dampak positif bagi pemerintah yaitu dengan terciptanya lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka kemiskinan khususnya di daerah tersebut. Pendapatan pemerintah juga akan meningkat dengan diberlakukannya pajak dan royalti terhadap pengelolaan sumber daya hutan tersebut.

Akan tetapi Kebijakan penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan yang cenderung berpihak kepada usaha skala besar telah mengakibatkan ketimpangan akses yang berdampak pada kemiskinan masyarakat sekitar hutan, yang mana kegiatan perekonomiannya bergantung pada hasil hutan tersebut. Selain itu masyarakat sekitar hutan mengalami dampak lain berupa kekurangan pangan dan keterbelakangan pendidikan maupun kultural. Hal ini juga disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk dikawasan sekitar hutan serta produktivitas lahan pertanian yang mereka kelola semakin berkurang, akibat selanjutnya akan berpengaruh kepada penggunaan lahan hutan sebagai faktor produksi. Dampak lainnya bisa mengakibatkan penurunan kualitas lahan hutan, akibat kultur pertanian masyarakat yang masih tradisional yakni cara bertani yang tidak selaras alam. Sehingga bisa mengakibatkan berbagai dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan erosi.

Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1,6 juta Hektare (Ha), dimana sebagian lahannya dikuasai oleh perusahaan pertambangan milik negara yaitu PT. Timah, Tbk (PT. Timah Tbk, Kontrak karya Ijin Usaha Pertambangan hingga tahun 2025). Selama kurun waktu 10 tahun menjadi daerah otonom, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah kehilangan lahan produktif seluas 320.760 Ha yang dikarenakan usaha pertambangan timah baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun tambang rakyat dan dimana menjadi daerah pemasok timah bagi pasar global. Aktifitas pertambangan ini mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian bahkan sudah merambah ke kawasan hutan, dimana dari 657.510 Ha hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK No. 357/ Menhut-II/04 hanya tersisa 28 persen hutan dalam kondisi baik. Hutan diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan hasil hutan dari jenis meranti-merantian berupa kayu tiang, kayu api, junjung lada dan kayu bulat. Sebagian kayu tersebut merupakan kayu kelas satu dan banyak diperdagangkan keluar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Intensifnya pemanenan hutan diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan topografi yang relatif datar sehingga memudahkan mobilisasi angkutan truk dalam pengangkutannya. Menurut laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (2017) sekitar 70 persen hutan lindung bakau/mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini hilang dan rusak karena dikonversi menjadi aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit, jika hal ini diteruskan tanpa usaha perbaikan dan reklamasi lahan tambang yang berkelanjutan maka kemungkinan hutan yang tersisa menjadi rusak akan tata guna dan fungsinya.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Pengelolaan hutan produksi adalah usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu di hutan produksi. Tujuan pengelolaan hutan produksi adalah tercapainya manfaat ganda yaitu menghasilkan kayu, mengatur tata air, tempat hidup margasatwa, sumber makanan ternak dan manusia dan tempat rekreasi. Dalam keadaan tertentu, manfaat tersebut dapat saling tumbukan, sehingga perlu ditentukan prioritasnya. Disinilah diperlukan adanya tata guna lahan hutan yang permanen. Prinsip kelestarian hutan produksi diindikasikan oleh 3 (tiga) fungsi pokok yang

saling terkait dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu fungsi ekologis, sebagai suatu sistem penyangga kehidupan antara lain merupakan pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keaneka-ragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme. Fungsi sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan, serta untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan telah dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan dan kegiatan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kekeliruan kebijakan yang berpihak kepada usaha skala besar ini telah disadari pemerintah, dimana sejak tahun 1998 melalui SK Menhut no 47/1998 pemerintah telah memulai alokasi pemberian ijin pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan mengakomodasi pola-pola pengelolaan aslinya. Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah dari UU 41/1999 adalah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 (PP 6/2007) jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 (PP 3/2008) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Sedangkan permasalahan pemberdayaan masyarakat pada PP 6/2007 secara khusus dibahas pada Bagian Kesebelas "Pemberdayaan Masyarakat Setempat" yang terdapat dalam Bab IV Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan PP tersebut pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan di adopsi melalui skema pemberdayaan masyarakat yaitu melalui tiga skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan.

Aturan kebijakan yang lebih operasional juga telah dibuat dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah tersebut yaitu dengan disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permenhut Nomor : P. 52/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan P 49/Menhut-II/2009 tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permenhut nomor : P.14/Menhut-II/2010. Dengan disahkannya Permenhut No P

13/Menhut-II/2010 yang menitikberatkan pada proses penetapan areal kerja yang dilakukan melalui koordinasi awal antara pemerintah daerah melalui proses identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi. Melalui proses koordinasi ini diharapkan proses penetapan areal kerja dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Berbagai peraturan tentang hutan kemasyarakatan tersebut, diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan kerusakan hutan dan lahan yang ada. Perbedaan tingkat pemahaman, pengetahuan dan pengalaman antar kelompok masyarakat pengelola HKM perlu dijumpai untuk mewujudkan pembangunan hutan kemasyarakatan yang baik.

Dalam rangka membantu pelaksanaan program HKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya hutan produksi di Kotawaringin Kabupaten Bangka diperlukan peran serta semua pihak, baik peran dari masyarakat, pemerintah daerah dan juga peran dari dunia akademisi yaitu kampus dan mahasiswa. Forum DAS, BP DAS, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik Pemberdayaan Masyarakat. Salah satu peran bidang pembangunan kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat yang sangat diharapkan adalah pembinaan kelembagaan kelompok Hutan Kemasyarakatan, baik dari aspek administratif dan fungsi lembaga maupun penyelesaian kewajiban sebagai kelompok hutan kemasyarakatan, dimana kegiatan Pemberdayaan masyarakat ini akan dilakukan secara periodik.

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat kawasan hutan

produksi melakukan berbagai metode dan kegiatan dalam menjaga pelestarian lingkungan dengan melakukan tindakan yang meminimalisir kerusakan hutan seperti erosi, penebangan liar, pengambilan flora fauna endemik dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan menjaga pelestarian lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kegiatan ini juga melakukan koordinasi dengan *Alobi Foundation* yaitu adalah Lembaga Konservasi (LK) khusus yang berfungsi dalam konservasi satwa liar dikawasan hutan yang secara swadaya digagas oleh sekelompok masyarakat untuk mengelola dan menjaga kelestarian dengan cara pengawasan dan merehabilitas habitat flora dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat juga mengajak masyarakat sekitar dalam memanfaatkan hasil dari hutan untuk dijadikan kegiatan produk unggulan olahan hutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan hidup masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilakukan dengan berbagai cara sebagai menjaga konservasi hutan produksi yang berada Kotawaringin Kabupaten Bangka dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:

a. Rapat Pendahuluan, Survey Awal dan Sosialisasi Kepada Masyarakat. Merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk memulai pembuatan kebun bibit kelapa hibrida atau tanaman pangan lain. Setelah terbentuk tim inti dilakukan perumusan tujuan target tolak ukur keberhasilan jadwal kerja serta para mitra kerja

baik individu swasta LSM. Survey awal dilakukan untuk mengetahui kondisi ekologi di kawasan hutan. Survey ini dilakukan dengan melihat studi social-ekonomi, budaya, kependudukan, mata pencaharian, keanekaragaman jenis hutan keanekaragaman hayati untuk mengetahui persoalan yang ada di masyarakat. Sedangkan Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem Hutan di masyarakat sekitar hutan.

b. Pembuatan kebun kelapa hibrida atau usaha tanaman pangan lain. Pembuatan bedeng atau kebun bibit kelapa dipilih yang berdekatan dengan lokasi penanaman, hal ini bertujuan untuk mempermudah distribusi bibit saat penanaman. Penting untuk diperhatikan adalah kondisi lingkungan seperti tipe pasang surut di lokasi kebun bibit. Kebun bibit dibuat dengan menyesuaikan kondisi situasi dan budaya setempat serta anggaran yang dimiliki. Dalam pembuatan kebun bibit tempat persemaian dibuat untuk menyemaikan buah dengan metode bertingkat maupun tanpa tingkat atau tanpa bedeng. Survei lokasi buah kelapa dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa lokasi dan titik yang dapat dijadikan sumber bibit kelapa. Bibit yang baik rata-rata memiliki waktu yang sama di berbagai daerah di Indonesia biasanya matang pada bulan Januari sampai April setiap tahunnya.

c. Pemanfaatan tanaman kelapa dan tanaman pangan lainnya. Panen buah kelapa dan pengolahan pasca panen dilakukan di areal kerjasama kawasan hutan dengan mengumpulkan buah di gudang perusahaan kemudian dilakukan sortir untuk bisa dijual

kembali dengan diolah dan dimanfaatkan masyarakat dalam hasil turunan buah kelapa, baik menjadi santan, minyak kelapa ataupun produk lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Survey awal dilakukan sebelum pelaksanaan dan perencanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 dimana pada tahap awal ini bisa mengetahui kondisi ekologi di kawasan hutan. Pengabdian ini dilakukan dengan melihat studi sosial-ekonomi, budaya, kependudukan, mata pencaharian, keanekaragaman jenis hutan keanekaragaman hayati untuk mengetahui persoalan yang ada di masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa areal kemitraan kehutanan yang diberikan kepada PT NKL, maka masyarakat desa Labuh air pandan dan Kotawaringin dilarang merubah fungsi Kawasan hutan produksi, memperjual belikan lahan, mengagunkan dan memperluas area kawasan kecuali atas izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 1. Kegiatan Survey dan pendataan Awal

Hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 berupa kesepakatan atas Pengembangan kebun kelapa hibrida

dan tanaman pangan sebagai usaha pemanfaatan areal kerja kawasan hutan, dengan melaksanakan *agroforestry* komoditas kelapa dan usaha pemanfaatan tanaman sela. Selain itu melalui kegiatan *eduforestry* yang merupakan sistem usaha yang dibangun dalam pemanfaatan edukasi pemanfaatan alam kawasan hutan bersama masyarakat dengan Alobi Foundation. Hal ini mendorong kawasan hutan Kotawaringin akan menjadi sarana perlindungan flora dan fauna beserta ekosistemnya untuk kelestarian hutan lindung khususnya di areal Sungai Upang. Semua pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan prinsip kemitraan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Program terfokus kepada masyarakat sasaran secara partisipatif dan berkelanjutan. Program kegiatan melalui *Eduforestry* merupakan upaya rekayasa sosial yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi Universitas Bangka Belitung melalui kemitraan multistakeholder. Perguruan tinggi diharapkan melaksanakan MBKM sekaligus melaksanakan program pengabdian masyarakat berbasis hasil riset.

Masyarakat sekitar kawasan hutan produksi Kotawaringin dan Labuh air pandan sebagian besar pekerjaan sebagai petani dan berkebun, selain memiliki pekerjaan utama, ada juga yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan, pedagang dan buruh pabrik. Pekerjaan sampingan sangat membantu perekonomian karena dapat menambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Dari karakteristik masyarakat tersebut, maka tim pengabdian masyarakat melakukan berbagai dialogis dan edukasi untuk meningkatkan potensi kawasan hutan produksi. Selain itu dalam kegiatan ini juga memberikan dana bantuan berupa mesin pencacah kompos yang bisa

dimanfaatkan untuk membuat kompos berbahan baku tanaman. Selain itu untuk mendukung pendidikan masyarakat sekitar kawasan hutan juga dilakukan kegiatan bakti sosial dengan menggandeng berbagai mitra, dimana penyaluran dana bantuan dalam rangka peningkatan dana pendidikan bagi masyarakat kawasan hutan produksi Kotawaringin.



Gambar 2. Mesin Pencacah Pembuatan Pupuk

Sosialisasi edukasi pemanfaatan hutan juga diberikan kepada masyarakat sekitar kawasan. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem Hutan di masyarakat sekitar hutan. Dimana areal kerja perusahaan terbagi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu melihat aktivitas masyarakat dalam mengelola hutan secara langsung di beberapa kegiatan di desa Kotawaringin dan Labuh Air Pandan. Sedangkan indikator yang dianalisis berupa dampak sosial berupa pengetahuan masyarakat terhadap HKM, resolusi konflik lahan, perubahan perilaku dan proses sosial, dimana usaha yang dilakukan akan memberikan manfaat ekonomi berupa : peningkatan produksi, pendapatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, peluang dan kendala dalam pengembangan hutan menjadi

tanaman pangan atau lainnya dan kemitraan bisnis yang mampu dikembangkan dimasa mendatang.



Gambar 3. Tim pengabdian beserta narasumber

Menurut Citra, 2013 pengembangan wilayah berkaitan erat dengan upaya peningkatan kinerja wilayah dan keseimbangan perkembangan antar wilayah. Perencanaan dan pengembangan wilayah dimaksudkan agar semua daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Potensi pada subsektor perkebunan, memiliki komoditas yang sangat menjanjikan untuk pengembangan sosial dan ekonomi yang diharapkan menunjang kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan produksi Kotawaringin. Dalam hal ini dimaksudkan pada subsektor perkebunan kelapa dan tanaman pangan unggulan yang dapat menunjang kehidupan masyarakat dan pendapatan areal hutan tersebut. Sehingga pengembangan pada sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan kelapa dan tanaman pangan perlu dilakukan agar mempunyai daya saing untuk dikembangkan.

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dari pengabdian masyarakat tingkat Universitas. Maka tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan pendahuluan berupa Identifikasi Awal, edukasi masyarakat dimana Pengembangan kebun kelapa hibrida dan tanaman pangan sebagai usaha pemanfaatan areal kerja kawasan hutan produksi. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan *agroforestry* komoditas kelapa dan usaha pemanfaatan tanaman pangan lain. Selain itu melalui kegiatan *eduforestry* yang merupakan sistem usaha yang dibangun dalam pemanfaatan edukasi pemanfaatan alam kawasan hutan bersama masyarakat dengan Alobi Foundation. Hal ini bisa mendorong kawasan hutan Kotawaringin akan menjadi sarana perlindungan flora dan fauna beserta ekosistemnya untuk kelestarian hutan lindung khususnya di areal Sungai Upang. Sehingga kawasan tersebut juga berpotensi untuk dikembangkan kawasan wisata alam dan edukasi.

Tanaman kelapa atau tanaman pangan lainnya merupakan tanaman yang sudah dilakukan identifikasi mengenai tema keberlanjutan, dimana merupakan tujuan dasar dalam pengelolaan sumber daya alam kawasan hutan produksi yang berdasarkan komunitas lokal setempat. Pengelolaan sumberdaya alam dikawasan hutan produksi dengan tanaman kelapa maupun tanaman pangan lainnya memberikan komitmen pada bagaimana masyarakat mengelola sumber daya alam secara terintegrasi dengan pendekatan kelestarian lingkungan. Penanganan pencemaran lingkungan dengan menggunakan pupuk kompos, serta pengelolaan tanah, air, dan udara harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan peran masyarakat

kawasan hutan. Sehingga kearifan lokal penting untuk digali kembali dan diintegrasikan dalam pengelolaan sumber daya alam menuju keseimbangan ekosistem. Kearifan lokal harus selaras dengan teknologi ramah lingkungan.

Daftar Pustaka

Bengen dan Dietrich. 2001. Ekosistem Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Bengen D.G. 2004. Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Hutan. PKSPL – IPB, Bogor.

Citra, I. P. A. (2013). Analisis Faktor Pengaruh Pertumbuhan Wilayah Di Kabupaten Tabanan (Teori Baru Pertumbuhan Wilayah). Media Komunikasi FIS, 12(1).

PT. Narina Keisha Imani. 2022

Zakaria, F., & Suprihardjo, D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa

Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Teknik Pomits. <https://doi.org/2337-3520>